

DAFTAR PUSTAKA

- Chaizi Nasucha, Cipi D. Sutman, Sigit Henryanto, M. Ikhsan Ali, Solusi Perpajakan Terlengkap Tanya Jawab Dan Ilustrasi, Penerbit Majalah Berita Pajak Bekerjasama Dengan PT. Prenhailindo, 2000.**
- Gunadi, Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru, Jakarta, Penerbit Grasindo, 1997.**
- Harahap, Sofyan Syafri, Teori Akuntansi, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997.**
- Husein Umar, Riset Akuntansi, PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001.**
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 545/PJ/2000, Edisi Lengkap Undang-Undang Pajak Baru.**
- Keputusan Menteri Keuangan, Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26, Jakarta, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, 1995.**
- Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi Yogyakarta, 2000.**
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Kesatu. Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 1999.**
- Sihaloho Cyrus, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.**
- S. Munawir, Perpajakan, Edisi Keempat. Yogyakarta, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1992.**
- Waluyo, Wiwarawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-Undangan Perpajakan terbaru, Buku Satu, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2002.**
- Siregar, Retnawati, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan, 2008**

LEMBARAN OBSERVASI

Objek Observasi : PT. Tjipta Rimba Ojaya
 Tempat Observasi : Jl. Kl. Yos Sudarso Km. 7,5 Medan
 Waktu Observasi : 5 Desember 2009
 Observer : Syarusul Kamar

No.	Unsur variabel yang diamati	Hasil observasi				Dokumen Bukti Lain	Kode Dok
		SS 4	S 3	KS 2	TS 1		
	PPh Pasal 21						
1	Perusahaan telah memotong sesuai dengan objeknya.		✓				
2	Tunjangan Hari Raya merupakan penghasilan yang diterima pegawai secara tidak teratur.		✓				
3	Uang lembur merupakan penghasilan yang diterima/ diperoleh pegawai secara teratur.		✓				
4	Pembayaran asuransi dari Perusahaan asuransi kesehatan & asuransi kecelakaan kerja merupakan penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21		✓				
5	Biaya pensiun merupakan salah satu pengurangan yang diperbolehkan dalam penghitungan PPh pasal 21				✓		
6	Perusahaan menggunakan upah mingguan dalam membayar gaji karyawan				✓		
7	Perusahaan membayar uang pensiun secara bulanan kepada mantan pegawai				✓		
8	Syarat di dalam PTKP adalah jumlah tanggungan paling banyak tiga orang			✓			

9	Perusahaan harus menyusun dan melaporkan SPT tahunan PPh Pasal 21 setiap akhir tahun	✓				
10	Perusahaan dikenakan sanksi apabila terlambat menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT	✓				
11	Kurang bayar merupakan keputusan yang menentukan besarnya pajak terutang		✓			
12	Bukti pemotongan lembaran 2 untuk arsip perusahaan			✓		
13	Bukti pemotongan lembaran 3 dari SPT diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak	✓				
14	PPh pasal 21 harus disetor selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya		✓			
15	PPh pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak selambatnya hari ke 20 bulan berikutnya		✓			

Keterangan :

SS : Sangat Sesuai

KS : Kurang Sesuai

S : Sesuai

TS : Tidak Sesuai

Medan, 5 Desember 2009

Diketahui Oleh:

Dep. Pers & Umum

 

Lemta Surbakti, S.P.